

SKRIPSI

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BREBES DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Disusun oleh :**

Nama : Tahta Earland Arya Winata

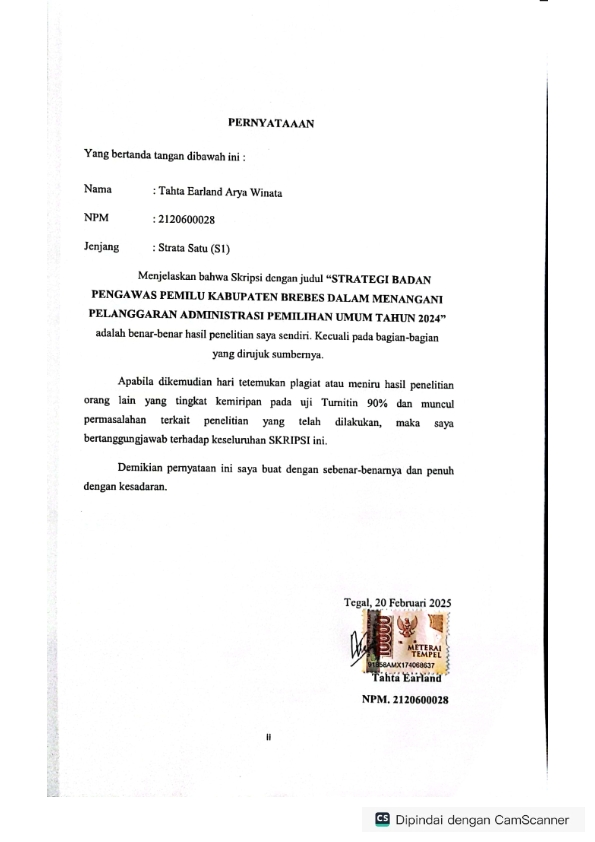
NPM : 2120600028

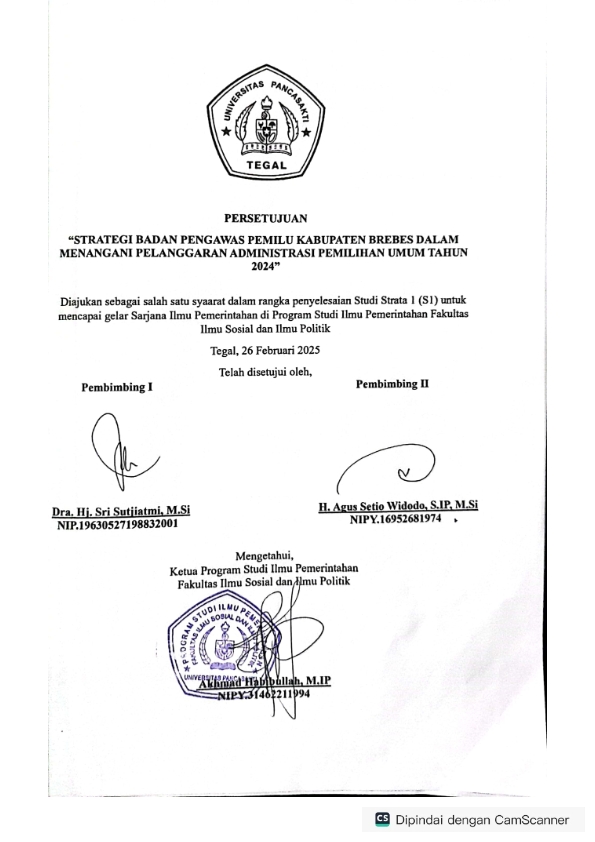
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

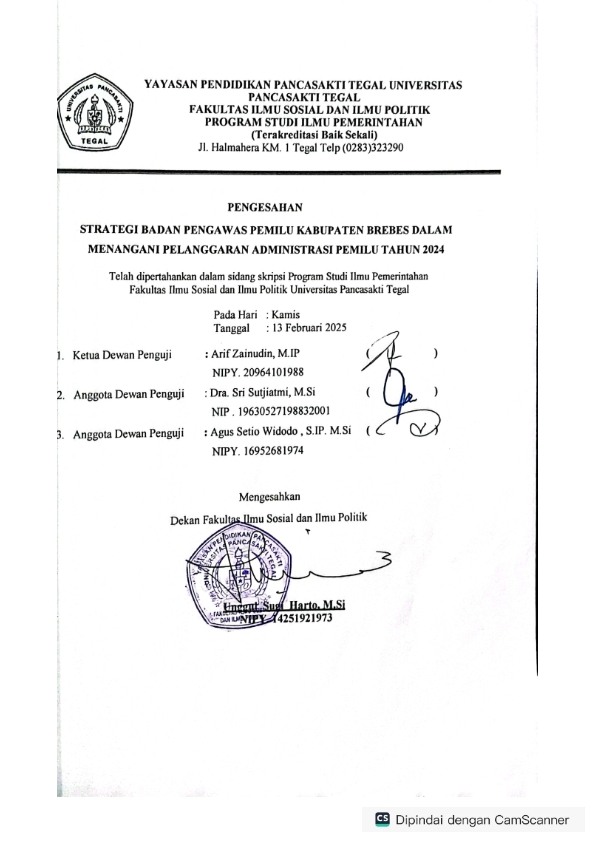
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

****

****

****

**MOTTO**

**Warga Iks dapat patah tangan nya dan dapat pula patah kaki nya, Tetapi tidak dapat ditaklukan selama tidak patah Iksnya**

**(Ikspi Kerasakti)**

# PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji syukur kepada tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa banggsa dan bahagia saya ucapkan rasa syukur sarta terimakasih saya kepada Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunianya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh hikmat, serta diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan dalam menyusun skripsi ini.
2. Kedua orang tua ku tercinta Bapak Taryono dan Ibu Rokhanah, yang tiada henti mendoakan kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua.
3. Dosen Pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran yang diberikan kepada Saya selama penyusunan skripsi.
4. Teman-teman Prodi Ilmu Pemerintahan Kelas A angkatan 2020, Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
5. Diri sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, terimakasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini.
6. Terima kasih kepada Teman organisasi Impera yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi saya.
7. Teima kasih kepada teman teman Perguruan Ikspi Kerasakti Ranting Pulosari Brebes yang telah memberikan tempat bagi saya untuk mencairkan pikiran dalam penyusunan skripsi ini dan memberikan motivasi hingga saat ini.

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata Program Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/Ibu yang kami hormati :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Unggul Sugiharto, S.IP, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ijin penelitian
3. Bapak Akhmad Habibullah, M.IP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal
4. Ibu Dra Sri Sutjiatmi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan tulus dan ikhlas yang menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunya skripsi ini.
5. Bapak Agus Setio Widodo, S.IP. M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan rela meluangkan waktunya yang telah memberikan bimbingan dan saran bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Staf Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu mahasiswa
7. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala hal dan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadikan amal kebajikan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih ada yang salah satu perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca kepada penulis agar karya ini dapat bermanfaat.

Tegal, 21 Februari 2025

Penulis

Tahta Earland

# ABSTRAK

Nama : Tahta Earland NPM : 2120600028 Judul : “Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024”

Pokok Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Strategi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi (2) Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif yang merupakan penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Strategi Bawaslu Kabupaten Brebes. Pengumpulan data di lakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Strategi Bawaslu Kabupaten Brebes dalam penanganan pelanggaran administrasi di Kabupaten Brebes berjalan dengan baik tetapi ada aspek yang harus diperbaiki. Selain itu juga ada beberapa kendala a) kurangnya SDM dalam Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi b) Kendala internal dan eksternal yang dihadapi Bawaslu

**Kata Kunci : Strategi Bawaslu, Bawaslu, Pemilihan Umum**

# *ABSTRACT*

*Name: Tahta Earland Arya Winata NPM: 2120600028 Title: "* *Strategy of the Brebes Regency Election Supervisory Agency in Handling Election Administration Violations in 2024"*

*The main problems of this research are: (1) What strategies are carried out by Bawaslu in handling administrative violations (2) Obstacles faced by Bawaslu of Brebes Regency.*

*The type of research carried out is descriptive qualitative, which is research that can provide a factual description of the Brebes Regency Bawaslu Strategy. Data collection was carried out by interviews, observation and documentation.*

*The results of this research show that the Brebes Regency Bawaslu strategy in handling administrative violations in Brebes Regency is working well but there are aspects that need to be improved. Apart from that, there are also several obstacles: a) lack of human resources in Bawaslu in handling administrative violations b) Internal obstacles faced by Bawaslu*

***Keywords*** ***Bawaslu Strategy, Bawaslu, General Elections***

**DAFTAR ISI**

[PERNYATAAN Error! Bookmark not defined.](#_Toc192229071)

PERSETUJUAN Error! Bookmark not defined.

[PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.](#_Toc192229071)

MOTTO v

[PERSEMBAHAN vi](#_Toc192229071)

KATA PENGANTAR Error! Bookmark not defined.

[ABSTRAK x](#_Toc192229075)

[*ABSTRACT* xi](#_Toc192229076)

[BAB I vii](#_Toc192229077)

[PENDAHULUAN vii](#_Toc192229078)

[**1.1** **Latar Belakang penelitian** vii](#_Toc192229079)

[**1.2** **Rumusan Masalah** 22](#_Toc192229080)

[**1.3** **Tujuan dan Manfaat Penelitian** 24](#_Toc192229081)

[**1.3.1 Tujuan Penelitian** 24](#_Toc192229082)

[**1.3.2 Manfaat Penelitian** 24](#_Toc192229083)

[BAB II 25](#_Toc192229084)

[TINJAUAN PUSTAKA 25](#_Toc192229085)

[**2.1 Penelitian Terdahulu** 26](#_Toc192229086)

[**II.2 Kerangka Teori** 29](#_Toc192229087)

[**II.2.1 Strategi** 30](#_Toc192229088)

[**II.2.3 Pemilihan Umum** 35](#_Toc192229089)

[**II.2.4 Bawaslu** 41](#_Toc192229090)

[**II.2.4 Pelanggaran Administrasi Pemilu** 46](#_Toc192229091)

[**II.3 Definisi Konsep Pokok Pokok Penelitian** 55](#_Toc192229092)

[**II.4 Alur Pikir** 56](#_Toc192229093)

[BAB III 58](#_Toc192229094)

[METODE PENELITIAN 58](#_Toc192229095)

[**III.1 Jenis dan Tipe Penelitian** 58](#_Toc192229096)

[**III.2 Tipe Penelitian** 58](#_Toc192229097)

[**III.3 Jenis dan Sumber Data** 59](#_Toc192229098)

[**III.4 Informan Penelitian** 60](#_Toc192229099)

[**III.5 Teknik Pengumpulan Data** 61](#_Toc192229100)

[**III.6 Teknik dan Analisa Data** 63](#_Toc192229101)

[**III.7 Sistematika Penulisan** 65](#_Toc192229102)

[BAB IV 67](#_Toc192229103)

[DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 67](#_Toc192229104)

[**IV.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Brebes** 67](#_Toc192229105)

[**IV.1.1 Letak Geografis Kabupaten Brebes** 67](#_Toc192229106)

[**IV.1.2. Demografi Penduduk Kabupaten Brebes** 69](#_Toc192229107)

[**IV.2 Deskripsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes** 72](#_Toc192229108)

[**IV.2.1 Letak Geografis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes** 72](#_Toc192229109)

[**IV.2.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes** 72](#_Toc192229110)

[**IV.2.3 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes** 73](#_Toc192229111)

[BAB V Error! Bookmark not defined.](#_Toc192229112)

[**V.1 Hasil Penelitian** **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc192229113)

[**V.1.1 Strategi Bawaslu Kabupaten Brebes Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024.** **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc192229114)

[**V.1.2 Kendala Bawaslu** **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc192229115)

[**V.1.3 Solusi Bawaslu** **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc192229116)

[**V.2. Pembahasan** **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc192229117)

[BAB VI Error! Bookmark not defined.](#_Toc192229118)

[PENUTUP Error! Bookmark not defined.](#_Toc192229119)

[**VI.1 KESIMPULAN** **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc192229120)

[**VI.2 SARAN** **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc192229121)

[Error! Bookmark not defined.](#_Toc192229122)

[Staf Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran data dan Informasi Error! Bookmark not defined.](#_Toc192229123)

[Error! Bookmark not defined.](#_Toc192229124)

[DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.](#_Toc192229125)

**DAFTAR TABEL**

[Tabel 1.1 Data Pelanggaran Administrasi Bawaslu RI Tahun 2019 7](#_Toc185804537)

[Tabel 1.2 Data Pelanggaran Administrasi Kabupaten Brebes Tahun 2024 10](#_Toc185804537)

[Tabel 4.1 Jumlah Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes 69](#_Toc185804537)

[Tabel 4.2 Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Brebes 7](#_Toc185804537)0

[Tabel 4.3 Daftar Rincian Jabatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 7](#_Toc185804537)5

**DAFTAR GAMBAR**

[Gambar 2.1 Alur 60](#_Toc185804537)

[Gambar 3.1 Komponen Analisis Data (Interactive Model) 65](#_Toc185804537)

[Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Brebes 68](#_Toc185804537)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## **Latar Belakang penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas kedaulatan rakyat, landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Negara merupakan salah satu entitas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur rakyatnya (Fikri dan Ukhwaluddin 2022), sementara di Indonesia, kedaulatan dipegang oleh rakyatnya pada aliena ke-4 (empat).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa,”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari kedaulatan berada ditangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab,hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat,serta memilih wakil rakyat diantaranya yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Provinsi ,serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan

hendaklah diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*) (Asshiddiqie 2006,70).

Sebagai wujud dari sistem demokrasi disuatu negara salah satunya adalah dengan menerapkan pemilihan umum yang bersifat secara langsung (Fikri, dkk 2022). Pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di selenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Adapun tujuan penyelenggaraan pemilu menurut Jimly Asshiddiqie, yaitu :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara (Asshiddiqie 2015, 418);

Pelanggaran Adminitrasi pemilu berasal dari Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu dan Pelanggaraan Administrasi yang dimaksud dengan temuan Pelanggaraan Administrasi adalah hasil pengawasan pengawas pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaraan Administrasi pemilu berdasarkan keputusan rapat pleno pengawas pemilu yang kemudian ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaraan Administrasi pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaraan.

Temuan Bawaslu kabupaten/kota disampaikan kepada Bawaslu/Provinsi atau temuan Bawaslu provinsi disampaikan kepada Bawaslu yang diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka. Penyampaian temuan memuat paling sedikit antara lain:

1. Identitas pengawas pemilu yang menemukan
2. Identitas terlapor
3. Waktu dan tempat peristiwa
4. Bukti dan saksi
5. Uraian peristiwa
6. Hal yang diminta untuk diputuskan

Laporan dugaan pelanggaraan Administrasi Pemilu disampaikan kepada Bawaslu/Provinsi atau Bawaslu/kabupaten secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. Syarat formil laporan dugaan Pelanggaraan Administrasi Pemilu memuat antara lain :

1. Identitas pelapor yang terdiri atas :
2. Nama
3. Alamat
4. Nomor telepon
5. Fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan dari dinas setempat
6. Identitas terlapor terdiri dari atas :
7. Nama
8. Alamat
9. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan pemilu

Sedangkan syarat materil laporan dugaan Pelanggaraan Administrasi pemilu memuat antara lain :

1. Objek pelanggaraan yang dilaporkan yang disertai :
2. Waktu peristiwa
3. Tempat peristiwa
4. Saksi
5. Bukti lainnya
6. Riwayat/uraian peristiwa

Menurut ketentuan Undang-Undang pemilu untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Dengan ketentuan apabila seseorang tidak terdaftar sebagai pemilih namun ikut pemilihan dalam pemungutan suara artinya telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu. Terkait mengenai pemilu terdapat banyak beberapa pelanggaran administrasi antara lain, pamasangan alat peraga kampanye di fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan jalan utama protokol. Peserta kampanye melakukan kampanye tatap muka yaitu ketika kampanye tidak memberikan pemberitahuan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) akan dilaksanakannya kampanye.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang ditelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, untuk melakukan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran administrasi pemilu oleh peserta pemilu dan tim kampanye pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, system pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yang kemudian diikuti oleh berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terkait tindakan yang diduga mengandung unsur pidana pemilu kepada ppihak yang berwenang. Oleh karena itu, koordinasi dengan pihak terkait, terutama lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, menjadi suatu keharusan agar temuan atau laporan pemilu dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif dengan bantuan dari lembaga lembaga tersebut. Selain itu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk bersikap adil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemilu mulai dari tingkatan yang lebih rendah, serta menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu.

Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu. Bawaslu berwenang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun pelanggaran dalam pemilihan umum yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 terbagi menjadi 3 yaitu; pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran etik. Hal ini justru memunculkan skema baru bahwa bawaslu bisa sebagai pemutus perkara. Hadirnya UU No. 7 Tahun 2017 memunculkan beberapa perubahan yang terdapat di dalam UU ini, salah satunya berupa perubahan mengenai pengaturan tentang penyelenggaraan pemilu. Bentuk perubahan tersebut adalah pemberian wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelanggaran administrasi pemilu berupa menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Pemilu sejatnya dijalankan sesuai dengan peraturan perundang undangan atau di laksanakan berdasarkan tata cara dan prosedur atau mekanisme yang telah di atur, agar Tindakan yang di lakukan berkesesuaian dengan tata cara, prosedur atau mekanisme harus dijaga, terhadap pelanggaran harus di lakukanya penanganan dengan penuh integritas, akuntabel, berkualitas. Dengan adanya peraturan undang-undang sejatinya dalam melaksanakan pemilu harus juga diikutidengan kemandirian, atau ketidakberpihakan, efisiensi, profesinonalisme, tidak berpihak dalam penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada, stabil, dan transparan.

Mengawali dari sebuah penanganan pelanggaran pemilu adalah proses pengawasan yang di laksanakan oleh Bawaslu karena pengawasan pemilu yang baik akan memproduksi hasil pengawasan yang baik. Hasil pengawasan yang baik akan dapat di jadikan temuan yang berkualitas temuan yang baik dan berkualitas akan mudah di proses dalam penanganan oleh pengawas pemilu sampai tahap pemeriksaan ke pengadilan. Maka pengawas pemilu harus melaksanakan standar operasional (SOP) Pengawasan secara professional, karena proses pengawasan tersebut adalah merupakan permasalahan/kasus yang akan di tangani oleh pengawas pemilu.

Dalam melakukan suatu tindakan tentu saja Bawaslu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawasan oleh Bawaslu menjadi suatu keharusan, yang di gambarkan dengan kerja keras dan kerja tuntas sebagai pengawas pemilu dalam mencapai tujuan, meskipun dengan alasan subjektif lembaga pengawasan memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi oleh karena itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja kerja pengawaasan secara operasional, hal ini disebut sebagai “politik pengawasan"

**Tabel 1.1**

**Data Pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu RI Tahun 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pelanggaran  Pidana | Pelanggaran  Kode Etik | Pelanggaran  Administrasi | Pelanggaran Hukum Lainya |
| 458 | 149 | 5.319 | 730 |

**Sumber: Data Bawaslu RI**

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelanggaran administrasi menduduki urutan pertama dengan jumlah 5.319 disusul dengan jenis pelanggaran hukum lainya 730, pelanggaran pidana 458 dan terakhir pelanggaran kode etik sebanyak 149. Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran pemilu yang meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

(Ratna Dewi Pettalolo:2019:38) mengungkapkan jika di kaitkan dengan konsep hukum yang berlaku universal, pelanggaran administrasi pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum prosedural dan dengan demikian pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk sebagai bentuk penangganan prosedur hukum.

Wirdjono Prodjodikoro ketua Makhamah Agung periode 1952-1966, memaknai pelanggaran sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari tatanan norma/ kaidah hukum yang berlaku. Dalam literatur hukum kata pelanggaran dibedakan dengan kata kejahatan, meskipun demikia tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana (Andi Hamzah, 2011:106)

Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggara pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera di tangani dengan baik, Adanya permasalahan dalam penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasaan terdahap keputusan pemilu atau pelanggaran pidana maupun administrasi yang mempengaruhi hasil, itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu.

Untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu menjadi kewenangan Bawaslu beserta perangkatnya, sebagaimana di atur dalam pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dugaan pelanggaraan pemilu, memutus pelanggaran administrasi pemilu, menginvestigasi dugaan pelanggaraan pemilu, menentukan dugaan pelanggaraan administrasi pemilu, Panwaslu menerima aduan atau laporan terkait dugaan adanya pelanggaran dan membuat rekomendasi atas hasil aduan mengenai pelanggaran administrasi pemilu kepada secara langsung.

**Tabel 1.2**

**Data Pelanggaran Administrasi Kabupaten Brebes Tahun 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KAB/KOTA/KEC\* | TAHAPAN | PELAPOR | | TANGGAL/  NOMOR LAPORAN/  TEMUAN | POKOK LAPORAN /TEMUAN | TERLAPOR | | HASIL KAJIAN AWAL | KETERANGAN TINDAKLANJUT BAWASLU | KETERANGAN TINDAKLANJUT INSTANSI LAIN |
| NAMA | KAPASITAS | NAMA | KAPASITAS |
| 1. | Kecamatan Banjarharjo | Kampanye | Sabar Utomo | Anggota Panwaslu Kec. Banjarharjo | Tanggal: 4 Desember 2023  001/Reg/TM/PL/Kec-Banjarharjo/14.12/XII/2023 | Terlapor diduga melakukan pelanggaran kampanye yang tidak ada pemberitahuan tertulis STTP kepada kepolisian resor brebes, dimana kampanye dilakukan pada tanggal 2 Desember bertempat di rumah yang bersangkutan pada pukul 19.00 WIB s.d 21.30 WIB yang dihadiri kurang lebih 200 peserta | Didi Tuswandi | Caleg DPRD PDI-P Dapil 4 Kab. Brebes | Registrasi | Rekomendasi Ke KPU Kab. Brebes | KPU Kabupaten Brebes  menindaklanjuti |
| Kampanye | Sabar Utomo | Anggota Panwaslu Kec. Banjarharjo | Tanggal: 5 Desember 2023  002/Reg/TM/PL/Kec-Banjarharjo/14.12/XII/2023 | Dria Wahana (Pelaksana Kampanye) melakukan kampanye pada tanggal 3 Desember 2023 bertempat di Rumah Pribadi tanpa ada Pemberitahuan Tertulis (STTP) | Dria Wahana | Caleg DPRD PKS Dapil 3 Kab. Brebes | Registrasi | Rekomendasi Ke KPU Kab. Brebes | KPU Kabupaten Brebes  menindaklanjuti |
| Kampanye | Sabar Utomo | Anggota Panwaslu Kec. Banjarharjo | Tanggal: 17 Desember 2023  03/Reg/TM/PL/Kec-Banjarharjo/14.12/XII/2023 | Terdapat beberapa APK Peserta Pemilu 2024 yang melanggar ketentuan PKPU No. 13 Tahun 2023, dimana terpasang di sepanjang trotoar jalan, pohon jalan, tiang listrik, dan tempat pendidikan, ibadah, serta fasilitas pemerintah. | Partai Politik | Peserta Pemilu | Registrasi | Rekomendasi Ke KPU Kab. Brebes | KPU Kabupaten Brebes  menindaklanjuti |
| 2. | Kecamatan Songgom | Kampanye | Rab’ah | Anggota Panwaslu Kec. Songgom | Tanggal: 8 Desember 2023  001/Reg/TM/PL/Kec-Songgom/14.12/XII/2023 | Kampanye terbatas partai PKB Caleg DPR RI dapil IX Hj. Nur Nadlifah, Caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil XII H. Musyaffa, Caleg DPRD Kabupaten Brebes Dapil I M. Iqbal Tanjung tidak sesuai jadwal kampanye yang tertera di STTP tanpa adanya  pemberitahuan kepada penyelenggara pemilu. | Iqbal Tanjung | Caleg DPRD PKB Dapil 1 Kab. Brebes | Registrasi | Rekomendasi Ke KPU Kab. Brebes | KPU Kabupaten Brebes  menindaklanjuti |
| Kampanye | Rab’ah | Anggota Panwaslu Kec. Songgom | Tanggal: 8 Desember 2023  002/Reg/TM/PL/Kec-Songgom/14.12/XII/2023 | Kampanye tidak menyertakan surat pemberitahuan tertulis, serta dalam kampanye tersebut menyertakan anak-anak yang tidak punya hak pilih serta terdapat pembagian amplop berisi uang transport Rp25.000 | Kingking | Caleg DPRD PDI-P Dapil 1 Kab. Brebes | Registrasi | Rekomendasi Ke KPU Kab. Brebes | KPU Kabupaten Brebes  menindaklanjuti |
| 3 | Kecamatan Ketanggungan | Kampanye | Rudi Suhendro | Anggota Panwaslu Kecamatan Ketanggungan | Tanggal: 17 Desember 2023  001/Reg/TM/PL/Kec-Ketanggungan/14.12/XII/2023 | Terdapat beberapa APK Peserta Pemilu 2024 yang melanggar ketentuan PKPU No. 13 Tahun 2023, dimana terpasang di sepanjang trotoar jalan, pohon jalan, tiang listrik, dan tempat pendidikan, ibadah, serta fasilitas pemerintah. | Partai Politik | Peserta Pemilu | Registrasi | Rekomendasi Ke KPU Kab. Brebes | KPU Kabupaten Brebes  menindaklanjuti |
| 4. | Kecamatan Brebes | Kampanye | Akhmad Ikhya Ulumudin | Anggota Panwaslu Kec. Brebes | Tanggal: 17 Desember 2023  01/Reg/TM/PL/Kec-Brebes/14.12/XII/2023 | Terdapat beberapa APK Peserta Pemilu 2024 yang melanggar ketentuan PKPU No. 13 Tahun 2023, dimana terpasang di sepanjang trotoar jalan, pohon jalan, tiang listrik, dan tempat pendidikan, ibadah, serta fasilitas pemerintah. | Partai Politik | Peserta Pemilu | Registrasi | Rekomendasi Ke KPU Kab. Brebes | KPU Kabupaten Brebes  menindaklanjuti |
| 5. | Kecamatan Wanasari | Kampanye | Iqbal | Anggota Panwaslu Kec. Wanasari | Tanggal: 17 Desember 2023  01/Reg/TM/PL/Kec-Wanasari/14.12/XII/2023 | Terdapat beberapa APK Peserta Pemilu 2024 yang melanggar ketentuan PKPU No. 13 Tahun 2023, dimana terpasang di sepanjang trotoar jalan, pohon jalan, tiang listrik, dan tempat pendidikan, ibadah, serta fasilitas pemerintah. | Partai Politik | Peserta Pemilu | Registrasi | Rekomendasi Ke KPU Kab. Brebes | KPU Kabupaten Brebes  menindaklanjuti |
| 6. | Kecamatan Losari | Kampanye | Afta | Anggota Panwaslu Kec. Losari | Tanggal: 17 Desember 2023  01/Reg/TM/PL/Kec-Losari/14.12/XII/2023 | Terdapat beberapa APK Peserta Pemilu 2024 yang melanggar ketentuan PKPU No. 13 Tahun 2023, dimana terpasang di sepanjang trotoar jalan, pohon jalan, tiang listrik, dan tempat pendidikan, ibadah, serta fasilitas pemerintah. | Partai Politik | Peserta Pemilu | Registrasi | Rekomendasi Ke KPU Kab. Brebes | KPU Kabupaten Brebes  menindaklanjuti |
| 7. | Kecamatan Bumiayu | Kampanye | Yuli Supriyanto | Anggota Panwaslu Kec. Bumiayu | Tanggal: 17 Desember 2023  001/LP/PL/Kec-Bumiayu/14.12/II/2024 | Terdapat beberapa APK Peserta Pemilu 2024 yang melanggar ketentuan PKPU No. 13 Tahun 2023, dimana terpasang di sepanjang trotoar jalan, pohon jalan, tiang listrik, dan tempat pendidikan, ibadah, serta fasilitas pemerintah. | Partai Politik | Peserta Pemilu | Registrasi | Rekomendasi Ke KPU Kab. Brebes | KPU Kabupaten Brebes  menindaklanjuti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Sumber : Bawaslu Kabupaten Brebes , 2024**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pelanggaran pemilu di Kabupaten Brebes pada tahun 2024 masih terjadi pelanggaran administrasi sebanyak 7 kasus, terlepas dari adanya terjadinya pelanggaran pemilu, Bawaslu selaku penyelenggara pemilu selalu melakukan inovasi dan langkah langkah strategi untuk mencegah terjadinya pelanggaran kembali, guna menciptakan pemilu yang adil, damai, kondusif sesuai ketentuan peraturan Undang Undang Dasar 1945.

Mengacu pada permasalahan diatas maka dapat untuk melakukan penelitian berjudul: “**STRATEGI BAWASLU KABUPATEN BREBES DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024”. (STUDY KASUS PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU)**

## **Rumusan Masalah**

Menurut Agung Wijaya, Masalah merupakan suatu keadaan tidak seimbang antara harapan atau keinginan dengan kenyataan yang ada. Sedangkan menurut Suriasumantri (2003: 312) menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai pasal 1 ayat (2) yang berbunyi,” Sistem pemelihan umum di indonesia adalah asas langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).

Bawaslu adalah lembaga pelaksana pemilihan umum yang memiliki tugas yaitu mengawasi penyelenggara pemilihan umum di semua wilayah Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pelaksana pemilihan umum yang menjalankan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undaang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Pelanggaran administrasi pemilu masih banyak terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Brebes, Bawaslu selaku badan pengawas pemilu dan penyelenggara harus melakukan suatu inovasi dalam menangani terjadinya pelanggaran administrasi kembali, dengan cara membuat langkah-langkah strategi dan solusi untuk menghadapi pemilu yang akan datang pada tahun 2024.

Berdasarkan pengertian masalah tersebut di atas, peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Strategi Bawaslu Kabupaten Brebes dalam menangani terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024?
2. Apa kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Brebes dalam menangani terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024?
3. Apa solusi yang akan dilakukan Bawaslu Kabupaten Brebes dalam menangani terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024?

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menggambarkan strategi Bawaslu Kabupaten Brebes dalam menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024?
2. Untuk menggambarkan kendala Bawaslu Kabupaten Brebes dalam menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024?
3. Untuk menggambarkan solusi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Brebes dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Tahun 2024?

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
2. Bagi ilmu pengetahuan hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang peneliti.
3. Manfaat Praktis
4. Penelitian ini bagi peneliti untuk meraih gelar sarjana strata 1 (S.IP) dan menerapkan teori dan pembuatan skripsi.
5. Bagi Bawaslu, Penilitian ini berguna sebagai tolak ukur Bawaslu Kabupaten Brebes dalam langkah meningkatkan kinerja
6. Bagi Pemerintah, Penelitian ini berguna untuk sumbangkan pemikiran bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan di pemerintahan
7. Bagi LSM, Berguna untuk dapat meningkatkan kesadaran publik dalam berpatisipasi terkait dengan pengawasan pemilu

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka atau disebut juga kajian Pustaka (*literature review*) merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji Kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan di teliti (Taylor & Procter 2010: 1). Dalam rangkaian proses penelitian, baik sebelum, ketika atau setelah melakukan penelitian, peneliti biasanya diminta untuk menyusun tinjauan pustaka umumnya sebagai bagian pendahuluan dari usulan penelitian ataupun laporan hasil penelitian. Menyusun sebuah tinjauan pustaka sama halnya dengan menyarikan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk mendapat gambaran tentang topik atau permasalahan yang akan diteliti sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul ketika memulai sebuah penelitian (Shavelson & Towne 2002: 144).

Dalam menyusun tinjauan pustaka, peneliti tidak hanya berusaha untuk membuat daftar tentang semua publikasi dan penelitian terkait tetapi harus sekaligus dapat melakukan sintesis dan evaluasi terhadap berbagai publikasi dan penelitian tersebut seusai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan (Taylor & Procter 2010:2)

Dengan menyusun tinjauan pustaka seperti ini, maka peneliti berupaya untuk dapat mengintegrasikan apa saja yang telah dikatakan atau dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, mengkritisi hasil penelitian atau publikasi ilmiah yang ada, dan

menjembatani berbagai area topik terkait, ataupun mengidentikasi isu utama dalam bidang terkait (Cooper 1998: 3)

Uraian di atas menunjukkan bahwa tinjauan pustaka diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. Ciri khas sebuah penelitian akan tampak dengan menunjukkan bahwa buku-buku, artikel, skripsi, tesis hingga disertasi yang ditelaah belum atau tidak menjawab persoalan yang diajukan oleh peneliti. Dengan demikian, tinjauan pustaka memiliki manfaat yang besar bagi calon peneliti untuk menelusuri lebih jauh apa yang akan dipermasalahkan dan bagaimana penelitian yang akan ia lakukan dapat mengisi kekosongan karena belum adanya penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya (*research gap*)

## **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian tentang beberapa peneitian yang pernah di lakukan bekenaan dengan objek serta pokok permasalahan yang sekiranya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sedikit banyak terinspirasi dan mereferensi dari penelitian penelitian sebelumnya antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahmat Setiyawan dengan judul “Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung” Penelitian ini dilatar belakangi keinginan untuk mengetahui pelaksanaan BAWASLU dalam menangani pelanggaran pemilu di Bandar Lampung.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian dekskriptif serta menggunakan pendekatan induktif dengan dasar pertimbangan penelitian yang tidak dapat proses perhitungan, serta metode ini penulis mengetahui cara pandang objek penelitian lebih mendalam.

Hasil penelitian ini menjelaskan masih banyaknya Pelanggaran yang terjadi kota Bandar Lampung di sebabkan oleh kurangnya kinerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika di temukan terjadinya pelanggaran pada pemilu. Dan Bawaslu menghadapi tantangan dalam menegakan hukum pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh Nancy Magdalena Sitorus dengan judul “Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2021 Di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat” Penelitian ini dilatar belakangi keinginan untuk mengetahui strategi Bawaslu kota Bekasi dalam mencegah praktik politik uang, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi strategi bawaslu selama melakukan pelaksanaan pemilihan umum.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, tujuan untuk mengetahui secara langsung serta menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang penelitian ini, penulis mengambil Teknik purposive sampling dan snowball sampling.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Strategi Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang menunjukan belum optimal karena indikator komunikasi belum maksimal dan juga program program bawaslu tidak semua tepat sasaran masih terdapat faktor penghambat.

Penelitian ini yang di lakukan oleh I Nengah Billy Rangga Wibawa dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur” Penelitian ini dilatar belakangi keinginan untuk mengetahui strategi Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis, objektif dan cepat sesuai dengan deskripsi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukan Bawaslu Kabupaten Jember sudah menunjukan perkembangan optimal dengan Strategi strategi Bawaslu yang telah di lakukan diantaranya dengan membuat program terkait dengan pengawasan dan pencegahan, meskipun juga ada hambatan hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini yang di lakukan oleh Mita Wardiyanti, Shobirin Noer, Machwal Huda dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019” Penelitian ini dilatar belakangi keinginan untuk mengetahui Strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran dikabupaten Jombang.

Metode yang di pakai dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan berupa data yang berasal dari hasil wawancara, catatan resmi yang lain mendukung.

Hasil penelitian ini menunjukan Pemilu dikabupaten Jombang masih banyak terjadi pelanggaran kampanye politik, Bawaslu kabupaten Jombang masih mengalami kendala kendala dalam melakukan penindakan dalam pemilu.

## **II.2 Kerangka Teori**

Definisi yang umum dibuat oleh Chinn & Kramer (1991) yang menyatakan “*theory is a systematic abstraction of reality that serves some purpose*" Terjemahan bebas, teori adalah proses abstraksi realitas secara sistematik yang digunakan untuk beberapa tujuan. Sehingga dalam penciptaan teori, realitas-realitas yang ada pada bumi di abstaksikan secara terorganisir. Teori diciptakan untuk berbagai macam tujuan antara lain penggambaran, penjelasan dan prediksi suatu masalah. Teori-teori tersebut kemudian diuji secara sistematik dalam “dunia nyata” oleh peneliti. Contoh teori yang cukup dalam ilmu kesehatan adalah teori kebutuhan manusia dari Maslow, teori Health Belief Model dari Rosenstock, teori adaptasi fisiologis terhadap stress dari Selye, teori pengendalian sakit, dan model promosi kesehatan dari Pender (Brink, 2009).

### **II.2.1 Strategi**

1. **Pengertian**

Asal kata “Strategi” adalah turunan dari kata dalam Bahasa Yunani, strategis. Pengertian strategi menurut Glueck dan Jauch adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang di rancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat di capai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Dapat disimpulkan pengertian strategi umum dan khusus yaitu:

1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai

1. Pengertian Khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*).

Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1995). Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut teori manajemen strategi organisasi antara lain dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis organisasi, selain itu juga dikenal strategi organisasi yang diklasifikasikan atas dasar tingkata tugas. Strategi-strategi yang dimaksud adalah strategi generic *(generic strategy)* yang akan dijabarkan menjadi strategi utaa/induk *(grand strategy).* Strategi induk ini selanjutnya dijabarkan menjadi strategi di Tingkat fungsional organisasi, yang disebut dengan strategi fungsional.

Pada dasarnya setiap organisasi mempunyai strategi dalam berusaha. Namun mungkin saja terjadi seorang pimpinan organisasi tidak menyadarinya. Dalam mengkaji organisasi strategi organisasi, perlu diketahui bahwa bentuk strategi akan berbeda-beda antar industri, antar oraganisasi, dan bahkan antar situasi. Namu nada sejumlah strategi yang sudah banyak diketahui umum dan dapat diterapkan pada berbagai bentuk industry dan ukuran organisasi.

Terdapat dua aliran besar yang dapat dijadikan landasan dalam menentukan strategi organisasi yaitu :

1. Strategi-strategi utama *(grand strategis)* merupakan seperangkat alternatif strategi organisasi yang secara umum dijadikan patokan dalam menentukan strategi yang akan diambil oleh suatu organisasi.
2. Strategi-strategi generic *(generic strategis)* misalnya *porter’s generic strategis.*

Dari setiap strategi yang di hasilkan dapat dipaparkan atau di turunkan berbagai macam program untuk menangani dan penindakan pelanggaran pemilu. Strategi ini sangat penting dilakukan mengingat masih banyak terjadinya pelanggaran pelanggaran pemilu yang terjadi, sehingga perlu dilakukan dengan membuat langkah langkah strategi dalam menangani pelanggaran pemilu di kabupaten Brebes.

1. **Perumusan Strategi**

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Peumusan strategi meliputi menentukan misi organisasi, menentukan tujuan tujuan yang ingin dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

1. Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alas an mengapa organisasi tersebut berdiri atau ada pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik, mengidentifikasikan tujuan mendasar dan yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain dan mengidetifikasi jangkauan operasi organisasi dalam yang dilayani.

1. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang diselesaikan dan kapan akan diselesaikan dan sebaiknya diukur jika memungkinkan pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil akhir dari penyelesaian misi.

1. Strategi

Strategi organisasi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuanya.

1. Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi.

1. **Implementasi Strategi**

Implementasi strategi adalah proses dimana mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

1. Program

Program adalah pernyataan aktivitas aktivitas atau langkah langkah yang di perlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi organisasi perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari suatu penelitian baru.

1. Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.

1. Prosedur

Prosedur atau sering disebut dengan (*Standard Operating* *Procedures)* Sop adalah system langkah langkah atau Teknik Teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

1. Evaluasi dan Kontrol

Evaluasi dan control mengukur apa yang dapat dihasilkan atau diraih oleh organisasi. Hal ini berarti membandingkan antara kinerja organisasi dengan hasil yang diharapkan organisasi.

**II.2.2 Macam-Macam Strategi**

Terdapat macam macam strategi yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu yaitu :

1. Strategi Preventif

Strategi preventif adalah usaha pencegahan meminimalisir pelanggaran pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran pelanggaran yang terjadinya yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan memetakan potensi kerawanan, menggordinasikan, memantau dan meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran.

1. Strategi Represif

Strategi represif adalah merupakan upaya yang terorganisir dimaksudkan untuk mengurangi atau menangani pelanggaran pemilu yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran pemilu. Strategi refresif dilakukan dengan cara menerima, memeriksa, mengkaji dugaan, mengivestigasi, menentukan dugaan pelanggaran, memutus pelanggaran.

### **II.2.3 Pemilihan Umum**

1. **Pengertian Pemilihan Umum**

Pengertian pemilu menurut Undang Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat (1) sarana kedaaulatan rakyat untuk memeilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Morissan (2005:17) Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat untuk mengetahui arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, yaitu memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara pengertian pelayanan publik dapat ditelusuri melalui dua cara, yaitu dengan memahami makna kata “pelayanan” dan “publik” maupun frase pelayanan public sebagai satu kesatuan yang telah menjadi istilah.

Menurut Aji Moertopo pengertian pemilu sebagai berikut: “pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatanya sesuai dengan asas yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR< DPRD, yang pada hakekatnya bertugas untuk bersama sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara. Pemilihan umum mempunyai 3 fungsi utama yaitu:

1. Sarana memilih pejabat public (pembentukan pemerintahan)
2. Sarana pertanggungjawaban publik
3. Sarana Pendidikan politik rakyat.
4. **Penyelenggara Pemilu**

Penyelenggara pemilu menurut Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 1 adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Selanjutnya, penyelenggara pemilu ini diatur dalam buku kedua UU No 7 tahun 2017, Dimana bab 1 tentang pengawas pemilu (Bawaslu) dimulai pasal 89 sampai pasal 154, dan Bab 3 tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimulai dari pasal 155 hingga pasal 166. Pengawasan penyelenggara pemilu dilakukan oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu adalah lembaga penyelenggaran pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 155 ayat 2 berbunyi: DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaraan kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU provinsi anggota KPU kabupaten/kota, anggota Bawaslu provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota.

1. **Fungsi dan Tujuan Pemilu**

Ramlan Surbakti menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi sistem pemilihan umum yaitu yang pertama adalah pemilihan umum berguna sebagai mekanisme dan prosedur pengumpulan suara pemilih (*votes*) menjadi sebuah tempat (*seats)* menyelenggara negara lembaga lesgislatif dan atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun local. Mekanisme inilah yang dapat dikatakan sebagai proses penyelenggaraan tahapan pemilu (Indra Pahlevi, 2015). Menurut Rose dan Mossawir terdapat fungsi fungsi pemilu yaitu:

1. Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung.
2. Sebagai wahana umpan baik antara pemilik suara dan pemerintah.
3. Barometer dukungan ragat terhadap penguasa.
4. Sarana rekrutmen politik.

Selain itu menurut Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan dilakukannya proses pemilihan umum menjadi 4 yaitu:

1. Diharapkan pemilihan umum dapat menajdi suatu alat untuk *check* and *balance* sehingga dalam pelaksanaanya memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan pemerintah secara baik, damai, dan tertib.
2. Untuk memungkinkan dilakukan pergantian pejabat yang nantinya akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga legislatif.
3. Untuk terciptanya dan sepenuhnya asas negara demokrasi yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara yang telah diatur dalam konstitusi.
5. **Asas Pemilu**

Undang Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat 1 pemilihan umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pemaknaan asas ini sebagai patokan atau tolak ukur untuk memastikan bahwa demokrasi pemilu berjalan dengan baik dan tidak mencederai hak hak rakyat dan lebih memastikan bahwa proses pemilihan umum yang benar benar demokratis dan menjunjung tinggi nilai nilai Pancasila. Berikut penjelasan asas asas pemilihan umum yaitu:

1. Asas langsung, memiliki pemaknaan bahwa pemilih wajib memilih secara langsung dan tidak dapat diwakili oleh siapapun dan di manapun. Karena prinsip langsung merupakan prinsip yang paling dasar dalam pemilu.
2. Asas umum, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang bersifat *nondergabelright* atau tidak dapat dibatasi atau mendapatkan hak yang sama yaitu memilih tanpa memandang ras, agama, suku, dan budaya.
3. Asas bebas, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap warga negara memilih bebas menentukan pilihannya tanpa diintervensi dan dipaksa dalam memilih suatu calon baik itu pemimpin negara maupun perwakilan rakyat.
4. Asas rahasia, yang memiliki pemaknaan bahwa dalam pemilihan setiap orang wajib untuk menjaga kerahasiaan siapa dan kenapa pemilih memilih calon tersebut sehingga tidak dapat membuat suatu dugaan yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar prinsip pemilu.
5. Asas jujur, dalam pemaknaan asas jujur ini mengandung pemaknaan bahwa semua orang yang terkait didalam pelaksanaan pemilu baik itu penyelenggara pemilih, maupun yang dipilih haruslah jujur dari awal proses pemilu sampai akhir pemilu.
6. Asas adil, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap orang harus mendapatkan hak yang sama sehingga terimplementasikan falsafah ke lima bangsa Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
7. **Pengawasan**

Menurut G.R Terry (2008:10), Pengawasan adalah menentukan standar, mengukur pelaksanaan dengan tujuan tujuan, menentukan sebab sebab penyimpangan penyimpangan dan mengambil tindakan tindakan korelatif dimana perlu. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, selaras dengan standar (ukuran). Menurut G.R Terry (2008:12), Prinsip atau pengawasan ada 4 yaitu:

1. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan.
3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar.
4. Memperbaiki penyimpangan dengan car acara tindakan yang tepat.

Adapun lima prinsip atau proses pengawasan menurut G,R Terry (2008:13) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tetapkan ukuran ukuran atau standar pengawasan adalah ketentuan dasar yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan, Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk dan objektif.
2. Monitor hasil hasil dan bandingkan dengan ukuran ukuran adalah pengamatan pekerjaan yang berjalan dalam pelaksanaan kegiatan rencana yang dilakukan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.
3. Perbaiki penympangan penyimpangan atau koreksi adlah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang terjadi penyimpangan.
4. Ubah dan sesuaikan acara pengawasan sehubungan dengan hasil hasil pengawasan dan perubahan kondisi kondisi adalah bagaimana merubah atau menyesuaikan cara pengawasan yang dilakukan sesuai dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan yang telah terjadi dari standar dan rencana serta sebab sebab penyimpangan.
5. Berhubungan selalu selama proses pengawasan adalah adanya koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang berkepentingan.

Tujuan utama dari pengawasan ialah agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu agar sistem pengawasan benar benar efektif artinya dapat merealisasikan tujuanya maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan penyimpangan dari rencana. (Manulang, 2006: 174)

### **II.2.4 Bawaslu**

1. **Pengertian Bawaslu**
2. **Tugas dan Wewenang Bawaslu**

Secara umum, tugas dan wewenang pengawas pemilu berdasarkan sistem peraturan perundang undangan mengenai penyelenggaraan pemilu terdiri dari (Nurhidayat Sardini, 2009:17) :

* 1. Menyusun dan menetapkan peraturan, serta pedoman teknis pengawasan tahapan Pemilu, pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi serta putusan dalam penyelesaian sengketa, yang diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu);
  2. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
2. Pendaftaran peserta Pemilu (partai politik pada Pemilu Legislatif atau bakal pasangan calon pada Pemilu Presiden/ Pemilihan Kepala Daerah);
3. Penetapan peserta Pemilu/pasangan calon;
4. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (Pemilu legislatif);
5. Pencalonan dan penetapan calon Anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pemilu legislatif);
6. Masa kampanye;
7. Masa tenang;
8. Pemungutan dan penghitungan suara;
9. Penetapan hasil Pemilu;
10. Pengucapan sumpah/janji
    1. Menerima laporan dugaan pelanggaran perundang-undangan Pemilu, serta menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada instansi lainnya untuk ditindaklanjuti, yang terdiri dari:
       1. Pelanggaran administrasi Pemilu, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan mekanisme dan prosedur dalam penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung unsur pidana Pemilu, untuk kemudian diteruskan kepada jajaran pelaksana Pemilu (KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya masing-masing);
       2. Pelanggaran pidana Pemilu, yaitu pelanggaran ketentuan pidana Pemilu, untuk kemudian diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan tingkatan masing-masing dan selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
       3. Pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap etika (code of conduct) penyelenggara Pemilu berdasarkan asas Pemilu, sumpah/janji jabatan dan kode etik penyelenggara Pemilu, untuk diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di ibu kota negara.
    2. Melaksanakan penyelesaian sengketa Pemilu
    3. Mengawasi tindaklanjut atas rekomendasi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa oleh institusi terkait;
    4. Mengawasi sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
11. Melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan disetarakan kedudukan bawaslu kota/kabupaten dengan bawaslu pusat dan provinsi sebagaimana tertera dalam undang-undang 7 Tahun 2017 maka secara spesifik tugas bawaslu kota/ kabupaten juga diatur, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 101 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
2. Pelanggaran Pemilu;
3. Sengketa proses Pemilu;
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
   * 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
     2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dprd kabupaten/kota;
     3. Penetapan calon anggota dprd kabupaten/kota;
     4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
     5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
     6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
     7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
     8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
     9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh kpu kabupaten/ kota dan seluruh kecamatan
     10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan
     11. Proses penetapan hasil pemilu anggota dprd kabupaten /kota;
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/ kota;
6. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/ kota, yang terdiri atas:
8. Putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
9. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
10. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
12. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
14. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **II.2.4 Pelanggaran Administrasi Pemilu**

1. **Pelanggaran Pemilu**

Pelanggaran menurut arti katanya dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa dihindarkan. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran.

Dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kajahatan atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang undangan dalam pemilu. Potensi pelaku pelanggaran pemilu menurut undang undang pemilu antara lain:

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, jajaran secretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya.
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye.
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, Pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
4. Profesi media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor.
5. Pemantau dalam negeri maupun asing.
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.

Tahapan yang sangat rentan terjadinya pelanggaran adalah pada tahapan kampanye, kampanye adalah kegiatan dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon, para pasangan calon ini dapat membentuk tim kampanye yang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksana teknis penyelenggaraan kampanye.

1. **Administrasi**

Secara etimologis atau asal kata, administrasi bersal dari Bahasa Inggris “*administration*”. Dengan bentuk infinitinya *toadminister* yang diartikan sebagai *to manage (*mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “*administratie*”. Yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya.

Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengedalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan *clerical work* (Silalahi, 2013: 5).

Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau kelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan Bersama (Silalahi, 2010: 8). Beberapa pendapat para ahli tentang administrasi dalam arti kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Herbert Simon mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan tujuan bersama.
2. Dwight waldo memberikan definisi administrasi sebagai daya upaya yang kooperatif, yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.
3. Dimock mengatakan bahwa administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki oleh masyarakat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.
4. Sondang P. Siagian mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, (pasalong : 2014 : 2).

Dari beberapa pendapat tentang pengertian administrasi diatas, pada dasarnya administrasi terdiri dari dimensi karakteristik dan dimensi unsur unsur yang melekat pada administrasi (Pasolong, 2014: 30). Dimensi karakteristik administrasi terdiri dari:

1. Efisien, yang berarti bahwa tujuan dari administrasi adalah untuk mencapai hasil secara berdaya guna. Tjokroamidjojo mengatakan bahwa efisien adalah perbandingan terbaik natara input dengan output atau perbandingan antara pengeluaran dengan keuntungan. Dengan kata lain perbandingan antara apa yang telah dihasilkan dengan apa yang seharusnya diselesaikan.
2. Efektifitas, yang berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. James L. Gibson mengatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama.
3. Rasional, yang berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna, yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Herbert A. Simon mengatakan bahwa rasional secara objektif, jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan organisasi.

Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional. Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat terwujud bila ada perencanaan yang realistic dan benar benar tepat, logis dan dapat dikerjakan.

1. **Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Dalam undang undang pemilu undang undang yang khusus mengatur tentang pemilu tidak memberikan definisi yang pasti tentang pelanggaran administrasi pemilu. Undang undang pemilu hanya memberikan memberikan penormaan bahwa “pelanggaran administrasi pemilu adalah meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik”. (Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2).

Terdapat empat unsur dalam rumusan pelanggaran administrasi pemilu pada ketentuan pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) yakni:

1. Pelanggaran tata cara.
2. Pelanggaran terhadap prosedur.
3. Pelanggaran terhadap mekanisme kedua, objek pelanggarannya berkenaan dengan administrasi pelaksanaan pemilu.

Lingkup pelanggaranya terbatas setiap saat tahapan penyelenggaraan pemilu, keempat pelanggaran administrasi tidak termasuk pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. (Fritz Edward Siregar: 2020:43).

Dalam pengertian yang umum, pelanggaran dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari tatanan norma dan kaidah hukum yang berlaku, dalam literatur hukum, kata pelanggaran dibedakan dengan kata kejahatan, meskipun demikian tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam ancaman pidana (Andi Hamzah, 2011:106).

Wirjono Prodjokikoro Ketua Mahkamah Agung periode 1952 – 1966, memaknai pelanggaran sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Kata administrasi berasal dari bahasa latin yakni *to manage.* Derivasinya antara lain menjadi *“administration”* yang berarti pemerintahan (*besturing).* Dalam KKBI, kata administrasi salah satunya diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi istilah administrasi dalam artikel ini dimaknai dalam konteks administrasi negara, yaitu keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah negara tertentu dalam usaha mencapai tujuan negara. Sondag: 1986:8).

Pendefinisian pelanggaran administrasi pemilu seperti yang telah diuraikan diatas, paling tidak sudah dapat mengatasi kerancuan definisi yang disebutkan dalam uu pemilu yang kualifikasi pelanggarannya bersifat opsional yaitu:

1. Pelanggaran terhadap tata cara.
2. Pelanggaran terhadap prosedur.
3. Pelanggaran terhadap mekanisme.

Dari segi makna istilah kata “tata cara, prosedur, maupun mekanisme” sesungguhnya memiliki makna yang sama, yaitu berkenaan dengan tata laksana. Oleh karena itu dalam penulis ini cmenggunakan istilah tata laksana untuk menggantikan tata cara, prosedur, mekanisme. Tata laksana yang dimaksud dalam penulis adalah tata laksana administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu yang dalam pelaksanaan pemilu yang dalam undang undang didesain dalam bentuk tahapan yang ditelah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pemilu, baik yang diatur dalam undang undang pemilu, maupun dalam bentuk peraturan yang baik dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, maupun yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Untuk memberikan arah dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu, maka pelanggaran administrasi pemilu didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. (Pasal 1 angka 32 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022).

1. **Bentuk Bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Dalam undang undang pemilu pelanggaran administrasi pemilu dibedakan dalam dua bentuk yakni:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu
2. Pelanggaran Administrasi pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (Pasal 461 ayat (1) jo Pasal 463 ayat (1) undang undang pemilu.

Didalam peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 8 tahun 2022 disebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. (Pasal 1 angka 32).

Sementara Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkiatan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapm penyelenggaraan pemilu, dan atau pasangan calon-calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang materi lainnya untuk empengaruhi penyelenggaraan pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. (Pasal 1 angka 33 perbawaslu nomor 8 tahun 2022 jo pasal 460 jo pasal 463 ayat (1) undang undang pemilu.

Objek pelanggaran administrasi pemilu adalah berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu melakukan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertugas menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu, menginvestigasi dugaan pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau tindak pidana pemilu, memutus pelanggaraan administrasi pemilu.

1. **Strategi Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Pelanggaraan administrasi pemilu adalah pelanggaraan terhadap ketentuan Undang-Undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan termasuk peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau PKPU. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu diantaranya mengatur tentang Bawaslu yang diberi wewenang dalam melaksanakan menangani pelanggaran administrasi pemilu. Yang prosesnya dilaksanakan melalui ajudikasi. Dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, memutus pelanggaraan administrasi pemilu sebagaimana ketentuan dalam pasal 461 ayat 1 dalam Undang-undang pemilu. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai menangani pelanggaran administrasi diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaraan Administrasi Pemilihan Umum (Perbawaslu No 8/2018). Disamping itu dasar hukum yang berkaitan yaitu Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanganan Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu No /2018).

Dugaan pelanggaraan yang ada dapat terjadi pada dua hal yaitu pertama, Temuan dan yang kedua Laporan. Temuan adalah hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaraan dan diplenokan oleh pengawas pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan, dituangkan dalam formular ADM-1 yang memuat paling sedikit, identitas penemu, identitas terlapor, waktu dan tempat peristiwaa dan hal yang di minta diputuskan. Temuan pelanggaraan administrasi pemilu diselesaikan secara berjenjang. Sementara Laporan adalah dugaan pelanggaraan yang disampaikan oleh WNI (Warga Negara Indonesia) yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu atau pemantau pemilu kepada pengawas pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui peristiwa. Melampirkan fotokopi KTP atau identitas lain yang dituangkan dalam formular ADM-2 yang memuat paling sedikit: identitas pelapor, identitas terlapor, waktu dan tempat peristiwa, bukti dan saksi. Uraian peristiwa dan hal yang dimintakan untuk diputuskan.

## **II.3 Definisi Konsep Pokok Pokok Penelitian**

Pokok-pokok penelitian merupakan defiisi secara terperinci dari konsep-konsep yang telah diuraikan diatas. Salah satu fungsinya yaitu untuk memberi petunjuk bagaimana suatu variable yang telah diteliti ini dapat diukur dengan indicator-indikatornya. Berdasarkan pengertian pokok-pokok penelitian diatas, peneliti ajukan beberapa pokok-pokok penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Bawaslu Kabupaten Brebes dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu :
2. Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaraan pemilu.
3. Menginvestigasi dugaan pelanggan administrasi pemilu.
4. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu.
5. Memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu.
6. Kendala
7. Internal

Kendala dari dalam bawaslu sendiri pengawas dan lembaga keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi.

1. Eksternal

Kendala bawaslu dari luar ketidaknetralan dan keterlibatan pihak terkait.

1. Solusi

Solusi adalah jalan mengatasi kendala dalam menangani pelanggaran administrasi.

## **II.4 Alur Pikir**

Alur pikir dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai proses yang memuat langkah-langkah atau proses-proses urutan mengenai topik atau tema penelitian. Peranan peneliti sangat dominan dalam menentukan keberhasilan penelitian sedangkan alur pikir sifatnya hanya membantu mengarahkan proses penelitian agar berjalan dengan sistematis.

|  |
| --- |
| **Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2024** |

Pemilihan Umum Tahun 2024

Undang­­-Undang Nomer 7 Tahun 2017

Pelanggaran Pemilu Di kabupaten Brebes Tahun 2024

Pemilihan Umum Sukses

Strategi Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihau Umum di Kabupaten Brebes

**Gambar 2.1**

**Alur Pikir**

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## **III.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Sugiyono (2010:6) mengartikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.

Menurut (Moleong,2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Mulyana,2003) mendeskrisikan penelitian sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

## **III.2 Tipe Penelitian**

Penelitian ditinjau dari tingkat eksplanasi, dapat dibagi menjadi penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif (Sugiyono,2010:7).

* + - 1. Penelitian Deskriptif

Penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variable secara mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variable dengan variabel lainnya.

* + - 1. Penelitian Komparatif

Penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variable (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda.

* + - 1. Penelitian Asosiatif

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih, penelitian asosiatif merupakan penelitian dengan tingkatan tertinggi disbanding penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan penelitian asosiatif dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala atau fenomena. Berdasarkan ke tiga tipe penelitian diatas, penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe deskriptif, artinya peneliti ingin mendeskripsikan tentang Strategi Bawaslu Kabupaten Brebes Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024.

## **III.3 Jenis dan Sumber Data**

Menurut Silalahi (2010:280), data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karateristik dari suatu gejala tertentu. Data merupakan fakta tentang karateristik tertentu dari suatu fenomena yang di melalui pengamatan.

1. **Jenis Data**

Adapun jenis data primer dan sekundur menurut (Sarwono, 2006:209).

1. Data Primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.

1. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

## **III.4 Informan Penelitian**

Menurut Bungin (2011:78), informan penelitian adalah subjek yang memahami objek penelitian. Sedangkan menurut Moleong (2006:132) informan penelitian adalah seorang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes
2. Komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes
3. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi
4. Anggota/Staff Penanganan, Data dan Informasi
5. Anggota Staff Bawaslu Kabupaten Brebes.

## **III.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah dalam keberhasilan sebuah penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan data dan digunakan untuk penelitian.

Menurut (Sugiyono,2012) terdapat empat teknik dalam pengumpulan data kualitatif yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Zuriah,2009). Kegiatan observasi pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Arikunto (2006:25) merupakan kegiatan yang meliputi perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera. Tujuan observasi ini adalah peneliti jadi mempunyai kesempatan untuk lebih mengenal dan mencermati calon informan di tempat penelitian.

Dalam Penelitian ini observasi yang dilakukan untuk meneliti secara langsung tentang Strategi Bawaslu Kabupaten Brebes Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024.

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dikonstrusikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu tertentu. Menurut (Zuriah,2009), wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan. Arikunto (2010:201-202) wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan tujuan memperoleh informasi dari terwawancara untuk menilai keadaan seseorang.

Dalam penelitian ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi. Anggota/staff Bawaslu Kabupaten Brebes.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik dan visual, verbal maupun tulisan. Menurut (Zuriah,2009) bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi dari catatan penting baik dari dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang berisi penjelasan untuk dapat membantu dalam penelitian. Dokumentasi dapat berbentuk gambat atau foto. Metode data digunakan untuk penelitian yang bersumber pada tulisan seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan-peraturan, arsip dan dokumen.

1. Triangulasi

Triangulasi dapat dipandang sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menguji apakah data yang dihasilkan merupakan data yang kredibel. Dengan kata lain triangulasi merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut (Moleong, 2002:178) Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. (Sugiyono 2008:83) Teknik triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

## **III.6 Teknik dan Analisa Data**

Menurut (Moleong, 2010:103) Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema seperti yang disarankan oleh data. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisa data lapangan yang dilakukan menganalisa data yaitu menurut (Miles,2014) terdapat tiga langkah untuk menganilasa data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifisikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Data yang telah direduksi akan lebih jelas dalam menggambarkan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan selanjutnya.

1. Penyajian Data (*Data Disply*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain sebagainya. Penyajian data pada penelitian kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif, yang kadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan (*chart)* atau sejenisnya.

1. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penelitian kualitatif mengedepankan temuan baru sebagai hasil akhir dari kesimpulan penelitiannya. Temuan baru tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas keberadaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sugiyono,2012) bahwa temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Model analisi data menurut Miles and Hubberman (2012) dikutip dari Octaviani dan Sutriani, (2019) sebagai berikut:

Data Collection

Data Display

Data reduction

Conclusions drawingverifying

**Gambar 3.1. Komponen Analisis Data (Interactive Model)**

(Sumber : Miles dan Huberman, 2012)

Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi satu sama lainnya, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

## **III.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ditujukan agar selama penulisan dapat diketahui secara jelas dengan penambahan penjelasan singkat. Sitematika penulisan dalam penulisan ini sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan

Berisi mengenai penjelasan terkait fenomena atau permasalahan yang menjadi dasar penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka

Berisi mengenai penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan pendalaman dalam penelitian, Kerangka Teori, Definisi konsep, Pokok-Pokok Penelitian dan Alur Pikir.

**BAB III** : Metode Penelitian

Berisi mengenai Jenis dan tipe penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu Penelitian Kualitatif, Jenis dan Sumber Data yaitu data primer dan data sekunder, Informan Penelitian, Teknik pengumpulan Data yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi, Teknik Analisi Data, dan Sistematika Penulisan.

**BAB IV**: Deskripsi Wilayah Penelitian

Berisi mengenai demografi wilayah penelitian yang sesuai dengan lokus penelitian.

**BAB V** : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi mengenai hasil-hasil yang diperoleh peneliti pada saat penelitian yang disesuaikan dengan instrument penelitian. Serta pembahasan terkait hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan analisis dan metode penelitian yang ditentukan.

**BAB VI** : Penutup

Berisi mengenai pembahasan hasil penelitian yang membahas tentang ketercapaian tujuan penelitian, Kesimpulan, dan saran.

# BAB IV

# DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Deskripsi wilayah & penelitian diberikan untuk memberikan gambaran umum lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk membantu dalam menentukan teknik pengumpulan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang akan diteliti.

## **IV.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Brebes**

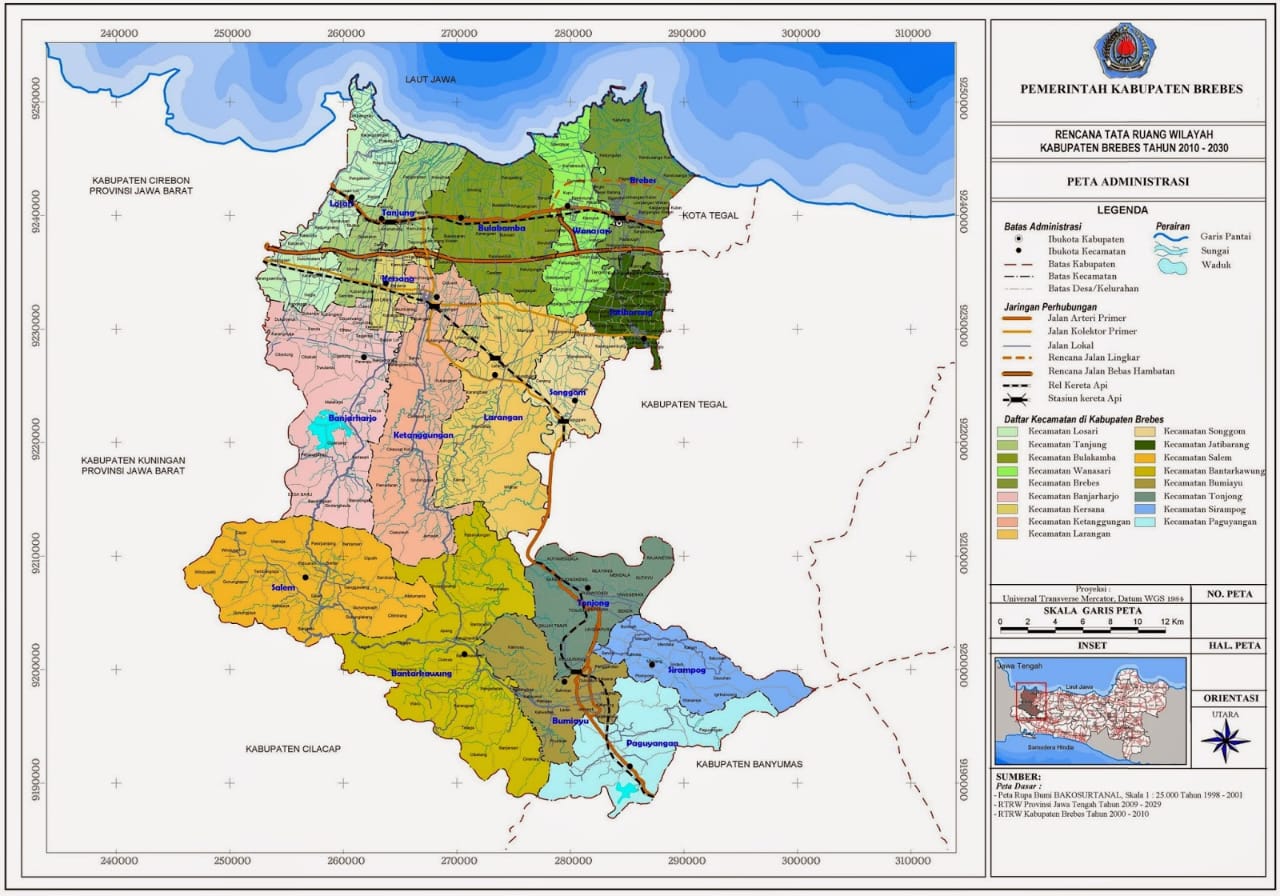
### **IV.1.1 Letak Geografis Kabupaten Brebes**

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak disepanjang Laut Jawa. merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memanjang keselatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan Kota Tegal, serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa barat. Letaknya antara 6°44’ - 7°22’ Lintang Selatan dan antara 108°41’ – 109’11’ Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Brebes sebagai berikut :

* 1. Sebelah Utara : Laut Jawa
  2. Sebelah Timur : Kota dan Kabupaten Tegal
  3. Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Cilacap
  4. Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon dan Kuningan di Provinsi Jawa Barat

**Gambar IV, 1**

**Peta Administrasi Kabupaten Brebes**



**Sumber :** [**http://ppid.brebeskab.go.id/index.php?menu=profilbrebes**](http://ppid.brebeskab.go.id/index.php?menu=profilbrebes)

Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah sebesar 1.769,62 km2 yang terbagi menjadi menjadi 17 kecamatan. Kecamatan Bantarkawung adalah kecamatan terluas dengan luas 208,18 km2. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kersana sebesar 26, 97 km2. Wilayah Kabupaten Brebes bagian Selatan sebagaian besar terletak dibagaian tinggi. Sedangkan wilayah bagian utara terletak di dataran rendah. Kecamatan tertinggi adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 m.Pada Tahun 2023 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu dengan rata rata hujan sebanjak 437 Mm dengan rata-rata hari hujan selama 31 hari. Sedangkan jumlah curah hujan tertinggi berdasarkan kecamatan terjadi di kecamatan salem sebanyak 3.351 Mm yang berasal dari pengamatan di satu stasiun pengukuran.

### **IV.1.2. Demografi Penduduk Kabupaten Brebes**

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2023 adalah 2.043.077 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,28 persen selama tahun 2020-2023. Jika dilihat dari Tingkat kepadatannya, dimana luas daerah ikut diperhitungkan, Kecamatan Kersana menempati urutan pertama sebagai kecamatan yang paling padat penduduknya di Kabupaten Brebes, di mana kepadatan penduduknya 2.591 penduduk/km2 yang berarti bahwa tiap 1 km2 ditempati 2.591 penduduk. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan pneduduk terendah ditempati oleh Kecamatan Salem, dimana kepadatan penduduknya hanya 389 penduduk/km2 yang berarti bahwa tiap 1 km2 hanya ditempati 389 penduduk.

**Tabel IV.1**

**Jumlah Kepadatan Penduduk Setiap Kecamatan di Kabupaten Brebes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk Per tahun 2020-2023 |
| 1 | Salem | 65.085 | 1,04 |
| 2 | Bantarkawung | 107.023 | 1,58 |
| 3 | Bumiayu | 117.198 | 1,55 |
| 4 | Paguyangan | 116.496 | 1,50 |
| 5 | Sirampog | 71.008 | 1,20 |
| 6 | Tonjong | 79.565 | 1,56 |
| 7 | Larangan | 162.997 | 1,37 |
| 8 | Ketanggungan | 146.834 | 0,69 |
| 9 | Banjarharjo | 132.520 | 0,88 |
| 10 | Losari | 143.422 | 1,37 |
| 11 | Tanjung | 108.714 | 1,33 |
| 12 | Kersana | 69.888 | 1,48 |
| 13 | Bulakamba | 186.539 | 1,06 |
| 14 | Wanasari | 167.529 | 1,37 |
| 15 | Songgom | 90.117 | 2,21 |
| 16 | Jatibarang | 87.899 | 0,41 |
| 17 | Brebes | 189.243 | 1,46 |
|  | Kabupaten Brebes | 2.043.077 | 1,28 |

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2024**

Dari tabel IV.1 jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2023 dapat diketahui keseluruhan jumlah penduduk adalah 2.043.077 Juta Jiwa. Kepadatan penduduk di 17 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Brebes dengan kepadatan sebesar 189.243 Jiwa. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Salem yaitu sebesar 65.085 Jiwa secara rinci dapat dilihat pada tabel diatas.

**Tabel IV.2**

**Jumlah Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur**

**Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Brebes**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Umur** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| 1 | 0-4 tahun | 82,237 | 78.785 | 161.022 |
| 2 | 5-9 Tahun | 81,023 | 77.637 | 158.660 |
| 3 | 10-14 Tahun | 79.041 | 74.643 | 153.684 |
| 4 | 15-19 Tahun | 78.292 | 74.018 | 152.310 |
| 5 | 20-24 Tahun | 82.760 | 77.970 | 160.730 |
| 6 | 25-29 Tahun | 89.053 | 82.243 | 171.296 |
| 7 | 30-34 Tahun | 90.133 | 83.839 | 173.972 |
| 8 | 35-39 tahun | 84.702 | 80.568 | 165.270 |
| 9 | 40-44 Tahun | 77.213 | 75.767 | 152.980 |
| 10 | 45-49 Tahun | 71.186 | 70.939 | 142.125 |
| 11 | 50-54 Tahun | 61.526 | 61.224 | 122.750 |
| 12 | 55-59 Tahun | 50.182 | 50.872 | 101.054 |
| 13 | 60-64 Tahun | 39.873 | 41.993 | 81.866 |
| 14 | 65-69 Tahun | 30.575 | 32.928 | 63.503 |
| 15 | 70-74 tahun | 19.968 | 21.943 | 41.911 |
| 16 | **75+** | 17.979 | 21.965 | 39.944 |

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2023**

Dilihat dari tabel IV.2 jumlah kepadatan penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Brebes menunjukan bahwa tingkat kepadatan penduduk yang masih dewasa cukup banyak, adalah pada kelompok umur 30-34 Tahun. Yaitu dengan jumlah 90.133 jiwa laki-laki dan Perempuan 83.839 jiwa dan pada kelompok umur 10-14 tahun menempati jumlah terbanyak yaitu dengan jumlah laki-laki 79.041 jiwa dan perempuan sebanyak 74.643 jiwa. Terdapat juga usia produktif 20-24 tahun yaitu dengan jumlah laki-laki 82.760 jiwa dan perempuan 77.970 jiwa.

## **IV.2 Deskripsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes**

## **IV.2.1 Letak Geografis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes**

Kantor Bawaslu Kabupaten Brebes terletak di lingkungan pusat \ pemerintahan Kabupaten Brebes, tepatnya di sebelah barat terdpat kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes di pimpin oleh seorang ketua yang bernama Trio Pahlevi, S.E. Dalam keterbukaan informasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu, pengelolaan informasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Brebes terus ditingkatkan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan *website* Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Brebes dengan alamat <https://ppid-brebes.bawaslu.go.id/>.

## **IV.2.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes**

1. **Visi**

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpecaya

1. **Misi**
2. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif
3. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana
4. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi
5. Memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel
6. Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta aparatur secretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih

## **IV.2.3 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes**

**Bagan IV.1**

**Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes**

Sumber : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Brebes Tahun 2024

Keterangan Nama Perangkat (Bagan IV.1)

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes : Trio Pahlevi, S.E
2. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat : Amir Fudin, S.PSI
3. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengekta : Karnodo, S.PI
4. Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan : Rudi Raharjo, S.A.P
5. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi : Hadi Asfuri, S.T

**Tabel IV.3**

**Daftar Rincian Jabatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** |
| 1 | Trio Pahlevi, S.E | Ketua |
| 2 | Amir Fudin, S.PSI | Divisi Pencegahan |
| 3 | Karnodo, S.PSI | Divisi Hukum |
| 4 | Rudi Raharjo, S.A.P | Divisi SDM |
| 5 | Hadi Asfuri, S.T | Divisi Penanganan |
| 6 | HB. Maria Indira Dewijani, S.I.P | Koor Sekretriat |
| 7 | Yeni Susanti, S.I.P | Sub Bag Administrasi |
| 8 | Moh. Ircham Arifudin, S.H.I, M.PD.I | Sub Bag Pencegahan |
| 9 | Rifan Azzam Amruloh, SH | Sub Bag Penanganan |
| 10 | Khairul Iman Susanto, SH, M.KN | Sub Bag Hukum |
| 11 | Muhammad Aidi Zulfa, S.H.I | Sub Bag SDM |
| 12 | Shinta Setiyaningrum, SE | Pelaksana |
| 13 | Yuliyana, SE | Pelaksana |
| 14 | Manja Lestari Damanik, S.P.D., SH | Pelaksana |
| 15 | M. Yusuf Rahardian, S.I.P | Pelaksana |
| 16 | Rizal Nur Efendi, S.KOM | Pelaksana |
| 17 | Irfan Riyanto, SH | Pelaksana |
| 18 | Arof Bustomy, S.E | Pelaksana |
| 19 | Johan Safrudin | Pelaksana |
| 20 | Yuno Istanto | Pelaksana |
| 21 | Sodiqun | Pelaksana |

**Sumber: Data bawaslu kabupaten Brebes Tahun 2024**

Dapat dilihat dari tabel IV.2 rincian jabatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023-2027 yaitu berdasarkan jumlah pegawai Badan pengawas Pemilihan Umum kabupaten Brebes terdiri dari 5 (lima) Perempuan dan 16 (enam belas) orang laki-laki. Semua pegawai Badan pengawas pemilihan Umum Kabupaten Brebes mempunyai tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) masing-masing serta bertanggung jawab dengan tugasnya. Dengan sumber daya yang baik maka akan tercipta strategi yang baik juga, maka dibutuhkan kerjasama yang bai kantar anggotanya.

1. **Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Brebes**

Tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai berikut :

**Bawaslu Bertugas**

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu disetiap Angkatan
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhdap
3. Pelanggaran pemilu
4. Sengketa proses pemilu
5. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas :
6. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
7. Perencanaan Pengadaan logistic oleh KPU
8. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
9. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas :
10. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
11. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
12. Penetapan peserta pemilu
13. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan
14. Pelaksanaan dan dana kampanye
15. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya
16. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS
17. Mencegah terjadinya praktik politik uang
18. Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
19. Mengawasi pelaksanaan putusan/Keputusan yang terdiri atas :
20. Putusan DKPP
21. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
22. Putusan/Keputusan Bawaslu,Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota
23. Keputusan KPU, KPU provinsi dan KPu Kabupaten/kota
24. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaraan netralitas ASN, netralitas Tentara Nasional Indonesia, Netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
25. Menyampaikan dugaan pelanggaraan kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
26. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
27. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
28. Mengevaluasi pengawasan pemilu
29. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
30. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

**Bawaslu Berwenang**

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengenai pemilu
2. Memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu
3. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas TNI dan Kepolisian Republik Indonesia
4. Memeriksa, mengkaji, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penylesaian sengketa proses pemilu
5. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota berhalangan hadir akibat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota apabila Terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Bawaslu Berkewajiban**

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dari atau berdasarkan kebutuhan
4. Mengawasi pemuktakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakutkan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan